



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Faktor Pendukung Terwujudnya *China-Australia Free Trade Agreement* Antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015

Skripsi

Oleh

Gabriela Auriel

6091801001

BANDUNG

2022



Parahyangan Catholic University
Faculty of Social Science and Political Science
International Relations Programme

Accredited A

SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**China Australia Free Trade Agreement Supporting Factors in
2015 between China and Australia**

Thesis

By

Gabriela Auriel

6091801001

Mentor

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

BANDUNG

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Gabriela Auriel
Nomor Pokok : 6091801001
Judul : Faktor Pendukung Terwujudnya *China-Australia Free Trade Agreement* Antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 23 Juni 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap Anggota

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Sekretaris

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Gabriela Auriel

NPM : 6091801001

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Faktor Pendukung Terwujudnya *China-Australia Free Trade Agreement* antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia untuk menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juni 2022


METERAI
TEMPEL
88AAJX823848007
Gabriela Auriel

ABSTRAK

Nama : Gabriela Auriel

NPM : 6091801001

Judul : Faktor Pendukung Terwujudnya *China-Australia Free Trade Agreement* antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terwujudnya *China-Australia Free Trade Agreement* antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015. Setelah negosiasi panjang yang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun dengan 21 putaran negosiasi serta beberapa tekanan dalam negeri, akhirnya ChAFTA disetujui pada tahun 2015. Tiongkok merupakan negara utama tujuan ekspor bagi Australia, sementara itu Australia merupakan negara yang memiliki pengaruh penting di Asia Pasifik bagi Tiongkok. Dengan disetujuinya ChAFTA oleh kedua negara, maka hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun non-tarif dihapuskan sehingga mampu mempererat hubungan perdagangan kedua negara. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diambil adalah “Apa faktor yang melatarbelakangi Tiongkok dan Australia menyetujui negosiasi *China-Australia Free Trade Agreement* pada tahun 2015?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional kategori *middle-range* Objective K.J Holsti, teorema H-O oleh Eli Hicksher-Ohlin dan konsep *Bilateral Trade Agreement* yang dikemukakan oleh Jayant Menon. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa kepentingan nasional setiap negara mendorong Tiongkok dan Australia untuk menandatangani ChAFTA. Penulis juga menemukan bahwa faktor politik lekat hubungannya dengan hubungan ekonomi kedua negara. Selain itu tentunya faktor ekonomi yang mampu membawa keuntungan bagi negara menjadi faktor pendukung disetujuinya ChAFTA.

Kata kunci: ChAFTA, Australia, Tiongkok, Ekonomi, BTA

ABSTRACT

Name : Gabriela Auriel

NPM : 6091801001

Title : *China-Australia Free Trade Agreement Supporting Factors in 2015 between China and Australia*

This research aims to determine the factors behind the realization of the China-Australia Free Trade Agreement between China and Australia in 2015. After extensive negotiations with twenty-one rounds that lasted for almost ten years and some domestic pressure, ChAFTA was signed in 2015. China is Australia's major export destination, for China, Australia has an important influence in the Asia Pacific. With the realization of ChAFTA by the two countries, both tariff and non-tariff barriers were removed to strengthen trade relations between the two countries. Therefore, the research question taken is "What are the factors behind China and Australia agreeing to the negotiations on the China-Australia Free Trade Agreement in 2015?". This research was analyzed by using the national interest concept mainly the middle-range Objective category by K.J Holsti, H-O theorem by Hicksher-Ohlin and Bilateral Trade Agreement concept by Jayant Menon. The results of this research show that the driving factors of ChAFTA by China and Australia are the national interests of each country, political factors and economic factors.

Keywords: ChAFTA, Australia, China, Economy, BTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Faktor Pendukung Terwujudnya Perjanjian *China-Australia Free Trade Agreement* antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015**” sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mencari tahu mengenai fakto-faktor apa saja yang mendukung terwujudnya *China-Australia Free Trade Agreement* baik dari sisi Australia maupun Tiongkok yang pada akhirnya berhasil di tanda tangani setelah 10 tahun lamanya negosiasi berlangsung diantara kedua negara. Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap Hubungan internasional. Penelitian ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Penulis juga terbuka atas saran dan kritik yang membangun sehingga mampu membantu penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

Bandung, 28 Juni 2022

Gabriela Auriel

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	18
1.2.3 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan penelitian.....	19
1.3.2 Kegunaan penelitian.....	19
1.4 Kajian Literatur.....	20
1.5 Kerangka Pemikiran.....	24
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.6.1 Metode Penelitian.....	33

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.7 Sistematika Penelitian.....	36
BAB II KERJASAMA AUSTRALIA-TIONGKOK SEBELUM PEMBERLAKUAN ChAFTA.....	38
2.1 Sejarah Hubungan Kerjasama Australia-Tiongkok.....	38
2.2 Hubungan Kerjasama Ekonomi Australia dan Tiongkok Sebelum Terbentuknya ChAFTA pda tahun 2015.....	42
2.3 Potensi Ekonomi Australia dan Tiongkok Dalam Melakukan Kerjasama ChAFTA.....	48
2.3.1 Potensi Ekonomi Australia.....	48
2.3.2 Potensi Ekonomi Tiongkok.....	53
BAB III FAKTOR PENDUKUNG PENANDATANGANAN ChAFTA OLEH AUSTRALIA DAN TIONGKOK.....	59
3.1 Penandatanganan ChAFTA.....	59
3.2 Kepentingan Nasional Australia dan Tiongkok Dalam Mewujudkan ChAFTA tahun 2015	62
3.2.1 Kepentingan Nasional Australia.....	62
3.2.2 Kepentingan Nasional Tiongkok.....	66
3.3 Liberalisasi Pasar antara Australia dan Tiongkok.....	69
3.4 <i>Politically Motivated</i> dan <i>Economically Motivated Driven</i> Disetujuinya ChAFTA Oleh Australia dan Tiongkok.....	72
3.4.1 <i>Politically Motivated</i>	72
3.4.2 <i>Economically Motivated Driven</i>	75

BAB IV KESIMPULAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Duapuluh Satu Putaran Negosiasi ChAFTA.....	7
Tabel 2. Perdagangan Barang Tiongkok dan Australia	47
Tabel 3. Total Ekspor Australia tahun 2000-2005.....	48
Tabel 4. Ekspor Unggulan Australia ke Tiongkok tahun 2005.....	52
Tabel 5. Ekspor dan FDI Tiongkok tahun 1980-2001.....	55
Tabel 6. Ekspor Unggulan Tiongkok ke Australia tahun 2005.....	57
Tabel 7. Komoditi Ekspor Unggulan Australia ke Tiongkok.....	69
Tabel 8. Komoditi Ekspor Unggulan Tiongkok ke Australia.....	70
Tabel 9. Tahapan Eliminasi Produk Impor Australia ke Tiongkok.....	83
Tabel 10. Produk Kategori D Impor Tiongkok dari Australia.....	84
Tabel 11. Tahapan Eliminasi Produk Impor Tiongkok dari Australia.....	85
Tabel 12. Produk Ekspor Australia ke Tiongkok dan Jangka Waktu Pemotongan Tarif.....	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Alasan Negara Memulai Perdagangan Internasional.....	30
Grafik 2. Ekspor Tiongkok ke Australia tahun 1901-1960.....	45
Grafik 3. Ekspor Australia ke Tiongkok 1901-1960.....	45
Grafik 4. GDP Australia tahun 1990-2010.....	48
Grafik 5. Impor dan Ekspor Australia ke Tiongkok Tahun 2000-2010.....	89
Grafik 6. FDI Tiongkok ke Australia tahun 2007-2018.....	90

DAFTAR SINGKATAN

APTA	<i>Asia-Pacific Trade Agreement</i>
AUSFTA	<i>Australian -United States Free Trade Agreement</i>
AWMU	<i>Australian Workers Manufacturing Union</i>
BTA	<i>Bilateral Trade Agreement</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
ChAFTA	<i>China-Australia Free Trade Agreement</i>
CTC	<i>Change of Tariff Classification</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GATS	<i>General Agreement on Tariff in Services</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
IO	<i>International Organization</i>
MFN	<i>Most Favoured Nation</i>
MNC	<i>Multinational Company</i>
MNP	<i>Movement of Natural Persons</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
PTA	<i>Preferential Trade Agreement</i>
PwC	<i>Price Waterhouse Cooper</i>
RoO	<i>Rules of Origins</i>

SPS	<i>Sanitary and Phytosanitary Measures</i>
TBT	<i>Technical Barriers to Trade</i>
UNESCAP	<i>United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya perang dingin, Ekonomi Politik Internasional menjadi salah satu isu penting di dalam hubungan Internasional. Ekonomi Politik Internasional menjelaskan bahwa ekonomi dan politik atau pasar dan negara pada dasarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹ Di dalam hubungan tersebut, perdagangan merupakan salah satu faktor penting yang bermain di dalamnya. Melalui perdagangan, negara mampu berinteraksi atau melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kepentingan nasional negaranya. Namun di tengah era globalisasi ini, sektor ekonomi ikut mengalami globalisasi yang mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan sehingga sistem perdagangan internasional turut mengalami perubahan.

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana dunia dapat saling berhubungan tanpa batasan. Melalui globalisasi, negara diberi kesempatan untuk memperdalam atau memperluas hubungan mereka miliki dengan negara lain. Salah satu sektor yang terpengaruh globalisasi adalah sektor ekonomi. Globalisasi ekonomi membuat banyak negara pada akhirnya melakukan liberalisasi terhadap pasar di negaranya guna memperoleh keuntungan ekonomi bagi negaranya.

¹ Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional* (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Jayabaya, 1997), 4.

Konsep liberalisasi pasar ini mengedepankan sistem ekonomi terbuka dimana dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, suatu negara akan menghapuskan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu lajur perdagangan hingga nol seperti hambatan politik terhadap integrasi ekonomi, biaya transport, komunikasi, sistem penghapusan hambatan tersebut biasa disebut sebagai sistem pasar bebas.² Dengan dihapuskannya hambatan-hambatan perdagangan maka akan memberikan kemudahan bagi setiap negara yang memberlakukan liberalisasi ekonomi dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara global. Namun, hal ini mampu menyebabkan persaingan ekonomi antar negara menjadi semakin ketat.

Kondisi tersebut kemudian mendorong negara untuk menjaga atau memperkuat perekonomian negaranya dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama ini dilakukan oleh Tiongkok dan Australia melalui perjanjian *China-Australia Free Trade Agreement* pada tahun 2015 yang mendorong pentingnya kerjasama ekonomi antar kedua negara. ChAFTA terbentuk setelah negosiasi selama kurang lebih 10 tahun, yang pada akhirnya perjanjian tersebut ditandatangani pada bulan Desember tahun 2015.³ Perjanjian ini mengatur arus perdagangan antara Tiongkok dan Australia dalam teks yang terdiri atas 17 bab dan 4 lampiran, selain itu perjanjian ini juga mencakup kesepakatan pemerintah Australia dan pemerintah Tiongkok mengenai pengaturan fasilitas investasi, pengaturan visa untuk kerja dan berlibur serta *side*

² Martin Wolf, *Globalisasi : Jalan Menuju Kesejahteraan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 18.

³ East Asia Forum Economic Watch, “中国自由贸易区服务网,” *Fta.mofcom.gov.cn*, August 13, 2015, accessed October 4, 2021, http://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai/201508/27456_1.html.

letter mengenai kerjasama pelayanan pengobatan tradisional Tiongkok yang ikut ditandatangani dalam perjanjian ChAFTA.⁴

Sebelum terbentuknya ChAFTA, Tiongkok merupakan pasar ekspor, sumber *Foreign Direct Investment*, serta pasar barang pertanian paling besar bagi Australia.⁵ Tercatat pada tahun 2009-10, komoditi ekspor utama Australia terhadap Tiongkok adalah bijih besi (A\$ 25 miliar), batu bara (A\$ 5 miliar), tembaga (A\$ 1.7 miliar) dan wol (A\$ 1.5 miliar), selain itu produk industri lainnya seperti baju, komputer, alat komunikasi dan mainan juga ikut menjadi komoditi dalam kegiatan ekspor Australia terhadap Tiongkok.⁶ Ekspor sumber daya Australia telah diorientasikan terhadap Tiongkok, hal ini dibuktikan berdasarkan data pada tahun 2009 dimana lebih dari seperempat total ekspor sumber daya Australia ditujukan kepada Tiongkok.⁷ Hal ini menyebabkan Australia memiliki tingkat dependensi yang tinggi terhadap Tiongkok. Bagi Tiongkok, Australia kurang memegang bagian penting sebagai mitra dagang, akan tetapi kedua negara tetap memiliki hubungan yang erat dalam bidang ekonomi. Australia merupakan negara terbesar kedua yang dijadikan sebagai tujuan investasi bagi Tiongkok

⁴ Ministry of Commerce People's Republic of China, "Interpretation for the China-Australia Free Trade Agreement -," Mofcom.gov.cn, 2015, accessed October 4, 2021, <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Cocoon/201510/20151001144954.shtml>.

⁵ Australian Trade and Investment Commission, "China Market Overview," Australian Trade and Investment Commission, accessed October 6, 2021, <https://www.austrade.gov.au/australian/export/export-markets/countries/china/market-profile/market-profile>.

⁶ Jane Golley and Ligang Song, *Rising China : Global Challenges and Opportunities* (Canberra, Act, Australia: Anu E Press, 2011), 182.

⁷ *Ibid.*

setelah Amerika Serikat.⁸ Pada tahun 2009, saham yang dimiliki Tiongkok di Australia mencapai A\$ 9.2 miliar dan untuk saham FDI mencapai A\$ 9.2 miliar.⁹

Hubungan perdagangan kedua negara mulai dari ekspor jasa dan investasi terus berkembang setiap tahunnya. Hingga pada akhirnya kedua negara membentuk ChAFTA guna memperkuat hubungan ekonomi yang sebelumnya telah terbentuk. Di dalam perjanjian ChAFTA, Tiongkok dan Australia menetapkan tarif impor sebesar nol terhadap 82% dan 86% barang ekspor oleh masing masing pihak dimana proporsi tersebut pada akhirnya akan meningkat hingga 96% dan 100% seiring dengan berjalannya waktu.¹⁰ Melalui perjanjian ini, kedua negara memperoleh mampu memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kepentingan nasional masing masing. Di satu sisi, Australia mampu memperoleh keuntungan melalui pengurangan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian ChAFTA mengingat Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor mulai dari agrikultur, sumber daya dan energi terbesar bagi Australia.¹¹ Selain itu, di dalam perjanjian tersebut juga memfasilitasi perdagangan jasa dan investasi sehingga para investor Australia mampu melakukan investasi di pasar Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok mampu meningkatkan proporsi ekspor ke Australia dimana diperkirakan bahwa

⁸ Heng Wang, "An Assessment of the ChAFTA and Its Implications: A Work-In-Progress Type FTA with Selective Innovations?," papers.ssrn.com (Rochester, NY, January 30, 2017), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960440.

⁹ Jane Golley and Ligang Song, *Loc. Cit.*

¹⁰ Heng Wang, *Loc. Cit.*

¹¹ Department of Foreign Affairs and Trade, "China–Australia Free Trade Agreement | DFAT," www.dfat.gov.au, 2021, accessed October 6, 2021, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/Pages/australia-china-fta>.

total ekspor Tiongkok akan meningkat dari 1.7% menjadi sekitar 2.1% setelah ChAFTA diimplementasikan.¹²

Kedua negara saling menghapuskan hambatan perdagangan sebagai bentuk liberalisasi pasar dengan melakukan pembebasan tarif dan *anti-dumping* seperti yang tertulis di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh Australia dan Tiongkok. Melalui liberalisasi pasar tersebut, perjanjian ChAFTA mampu membawa hasil yang memberikan keuntungan baik bagi Tiongkok maupun Australia. Selain melalui besarnya keuntungan yang didapatkan oleh kedua negara, terdapat faktor lainnya yang mampu mendorong terwujudnya perjanjian ChAFTA. Maka, berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan berusaha untuk meneliti mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Tiongkok dan Australia menyetujui dibentuknya perjanjian ChAFTA pada tahun 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

FTA atau perjanjian perdagangan bebas merupakan sebuah pakta perdagangan antar negara dimana pakta tersebut dibentuk untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti menghilangkan tarif, kuota dan hambatan lainnya untuk sejumlah barang tertentu yang diperdagangkan antar negara yang terlibat di dalamnya.¹³ FTA memiliki tujuan yang jelas yakni untuk meningkatkan

¹² Ministry of Commerce People's Republic of China, "Interpretation for the China-Australia Free Trade Agreement -," Mofcom.gov.cn, 2015, accessed October 30, 2021, <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Cocoon/201510/20151001144954.shtml>.

¹³ Konstantinos Kepaptsoglou, Matthew G. Karlaftis, and Dimitrios Tsamboulas, "The Gravity Model Specification for Modeling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects: A 10-Year Review of Empirical Studies~!2009-07-09~!2010-01-28~!2010-04-22~!," *The Open Economics Journal* 3, no. 1 (May 4, 2010): 1–13, <https://doi.org/10.2174/1874919401003010001>.

perdagangan antar negara yang terlibat di dalamnya sebagai imbas dari penghapusan hambatan kelembagaan atau ekonomi yang mampu menghalangi kegiatan perdagangan.¹⁴ Perjanjian ini sendiri telah mendapatkan pengakuan dari WTO dalam pasal 24 GATT dan pasal 5 GATS dan pengecualian dari MFN.¹⁵ Banyak *scholars* yang mempercayai bahwa FTA merupakan salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kemampuan ekonominya dengan cara melakukan ekspansi dalam perdagangan internasional.¹⁶

ChAFTA menjadi salah satu perjanjian perdagangan bebas tingkat tinggi yang dilakukan oleh Tiongkok dan Australia.¹⁷ Perjanjian ini menjadi FTA pertama yang dicapai oleh Tiongkok dengan negara maju yang memiliki agregat ekonomi besar dan perjanjian ini juga dianggap sebagai “salah satu perjanjian perdagangan bebas dengan tingkat liberalisasi dan investasi perdagangan tinggi yang ditandatangani oleh Tiongkok sejauh ini”.¹⁸

Pembicaraan mengenai pembentukan ChAFTA telah dimulai sejak tahun 2003, Australia dan Tiongkok menandatangani kerangka perdagangan dan ekonomi, melalui kerangka perdagangan tersebut baik Australia maupun Tiongkok membentuk sebuah komitmen bilateral lebih lanjut guna memasuki fase negosiasi FTA.¹⁹ Negosiasi pembentukan ChAFTA ini dilakukan kurang lebih satu

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Shujiro Urata, “Globalization and the Growth in Free Trade Agreements,” *Asia-Pacific Review* 9, no. 1 (May 2002): 20–32, <https://doi.org/10.1080/13439000220141569>.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Heng Wang, “An Assessment of the ChAFTA and Its Implications: A Work-In-Progress Type FTA with Selective Innovations?,” *papers.ssrn.com* (Rochester, NY, January 30, 2017), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960440.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Johni Robert Verianto Korwa, “The China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA): Its Implications for Australia-United States Relations,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 15, no. 1 (July 1, 2019): 41–53, <https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2981.41-53>.

dekade yakni sejak tahun 2004 hingga tahun 2014, namun sulit untuk menemukan titik tengah guna melakukan finalisasi terhadap perjanjian FTA yang akan dilakukan oleh kedua negara. Dalam satu dekade tersebut, terdapat 21 ronde negosiasi yang akhirnya difinalisasi oleh Menteri Perdagangan dan Investasi Australia, Andrew Robb dan Menteri Perdagangan Tiongkok, Gao Hucheng, dengan menandatangani hasil dari negosiasi pembentukan ChAFTA pada tahun 17 November 2014.²⁰ Berikut merupakan topik pembahasan dalam duapuluh satu putaran negosiasi hingga finaliasi ChAFTA.

Tabel 1. Dua Puluh Satu Putaran Negosiasi ChAFTA

Putaran negosiasi	Tempat dan Tanggal	Topik
Pertama	Sydney, 23 Mei 2005	Pembahasan mengenai isu prosedural seperti pembentukan tim negosiasi antar kedua negara.
Kedua	Beijing, 22- 24 Agustus 2005	<p>Pertukaran informasi secara komprehensif mengenai rezim perdagangan dan investasi.</p> <p>Dalam tahap ini pertukaran informasi dibagi menjadi empat bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Agrikultur dan karantina</i> Bagian ini membahas secara komprehensif mengenai kondisi pertanian setiap negara, kebijakan perdagangan, SPS, serta membahas hambatan perdagangan 2. <i>Trade in goods</i> Bagian ini membahas secara komprehensif mengenai hambatan tarif, hambatan non-tarif, bantuan industri, bea cukai, RoO, perbaikan perdagangan

²⁰ Department of Foreign Affairs and Trade, "About the Negotiations," Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2018, accessed March 18, 2022, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/negotiations/Pages/about-the-negotiations>.

		<p>serta pengadaan barang dan jasa.</p> <p>3. <i>Trade in service</i>, Bagian ini membahas lebih dalam mengenai pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, finansial, transportasi, profesi dan jasa tambang.</p> <p>4. Hak kekayaan intelektual Pada bagian keempat kekayaan intelektual meliputi kebijakan kompetisi, transparansi dan penyelesaian sengketa.</p>
Ketiga	Beijing, 2-4 November 2005	<p>Melanjutkan pertukaran informasi mengenai informasi rezim perdagangan dan investasi guna mempersiapkan negosiasi terkait dengan akses pasar.</p> <p>Dalam negosiasi putaran ketiga ini, terdapat 4 bidang pembahasan di dalamnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan standar pertanian serta karantina dan teknis. Dalam bidang ini, Australia menjelaskan mengenai sektor hortikultura yang sensitif. Sedangkan Tiongkok menjelaskan mengenai rincian SPS serta pembahasan mengenai TBT. 2. Perdagangan serta pengadaan barang dan jasa. 3. Perdagangan jasa, investasi dan perdagangan elektronik. 4. Kekayaan intelektual, kebijakan persaingan, transparansi dan masalah hukum dan kelembagaan.
Keempat	Canberra, 27 Februari -2 Maret 2006	<p>Pada tahap ini merupakan pertemuan substantive pertama yang memberikan dasar yang kuat mengenai hampir semua kemungkinan yang tertulis di dalam teks FTA antara Tiongkok dan Australia.</p>

		Dalam pertemuan ini terdapat beberapa bidang bahasan meliputi pertanian, SPS, perdagangan barang, RoO, prosedur kepabeanan, pengadaan barang dan jasa, TBT, serta jasa dan investasi termasuk pendidikan, jasa keuangan, telekomunikasi, perdagangan elektronik, dan pergerakan orang, kekayaan intelektual, transparansi, kebijakan persaingan, penyelesaian sengketa serta ketentuan kelembagaan lainnya.
Kelima	Beijing, 22 - 24 Mei 2006	<p>Kedua negara mulai untuk mempertimbangkan kemungkinan mengenai bentuk dan isi dari FTA.</p> <p>Terdapat beberapa diskusi dalam beberapa bidang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang pertanian Diskusi dilakukan dengan membahas mengenai kuota tarif Tiongkok yang membatasi ekspor gandum, wol, gula, kapas dan beras. Diskusi ini juga membahas mengenai SPS dan TBT. 2. Bidang perdagangan Dalam bidang ini, diskusi dilakukan untuk membahas mengenai pembatasan ekspor, perizinan impor, pajak ekspor serta prosedur bea cukai. 3. Merancang isi teks FTA awal terkait dengan kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, ketentuan kerangka kerja hukum dan kelembagaan, kebijakan persaingan serta ketentuan transparansi dalam perjanjian.
Keenam	Beijing, 31 Agustus- 6 September 2006	Dalam negosiasi tahap keenam, negosiasi ini melanjutkan pembahasan mengenai SPS, TBT dan RoO.

		<p>Negosiasi ini juga membahas beberapa bidang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang perdagangan Dalam bidang ini membicarakan mengenai peraturan pembatasan ekspor, peraturan izin impor serta pengadaan barang dan jasa. 2. Bidang Jasa Meliputi lintas sektoral, komunikasi, MNP, pendidikan serta keuangan. 3. Hak kekayaan intelektual Meliputi kebijakan persaingan dan transparansi.
Ketujuh	Canberra, 11-15 Desember 2006	<p>Pembahasan dalam putaran ketujuh meliputi beberapa hal yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan lebih lanjut mengenai teks terkait dengan SPS dan TBT 2. Australia meminta Tiongkok mengubah pendekatan RoO. 3. Melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan teks kepabeanan dan perdagangan elektronik. 4. Perdagangan jasa Kedua negara mendaftarkan hal - hal yang menjadi penghambat dan meminta untuk diturunkan meliputi hukum, keuangan, pendidikan, konstruksi, teknik, infrastruktur, dan perencanaan kota. 5. Kelanjutan pembahasan terkait dengan kekayaan intelektual.
Kedelapan	Beijing, 26-30 Maret 2007	<p>Diskusi lebih lanjut terkait perdagangan jasa dan negosiasi terkait hambatan dalam investasi.</p> <p>Terdapat beberapa pembahasan lebih lanjut mengenai beberapa dari putaran sebelumnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi berbagai hambatan

		<p>non-tarif</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem perizinan impor 3. Pembahasan lebih lanjut terkait SPS dan TBT 4. Lanjutan pembahasan terkait perdagangan elektronik serta pengadaan barang dan jasa 5. Australia melakukan pengajuan terhadap daftar penghalang perdagangan jasa meliputi akuntansi, transportasi dan logistik, telekomunikasi, tambang, pariwisata, lingkungan dan olahraga. 6. Pertukaran informasi terkait hambatan investasi. 7. Pembahasan terkait mekanisme konsultasi kekayaan intelektual.
Kesembilan	Beijing, 18-22 Juni 2007	<p>Pembahasan mengenai akses pasar tertahan dalam negosiasi tahap sembilan sehingga pembahasan terkait FTA dialihkan pada pembahasan lainnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelanjutan pembahasan terkait prosedur kepabeanan. 2. Australia memperkenalkan draft teks perizinan impor dalam bab <i>Trade in Goods</i>. 3. Australia melakukan identifikasi langkah langkah non tariff Tiongkok 4. Australia meminta untuk dilakukannya sesi khusus guna membahas mengenai produk pertanian yang terpengaruh oleh kuota tarif. 5. Memperkecil kesenjangan dalam bidang SPS dan TBT. 6. Australia menambahkan isu mekanisme konsultasi dan perlindungan terhadap informasi rahasia dalam bab kekayaan intelektual.
Kesepuluh	Canberra, 22-26	Dalam negosiasi putaran kesepuluh, kedua

	Oktober 2007	<p>negara melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Australia mengutarakan isu non tarif meliputi pembatasan penjualan daging jangguru, pemeriksaan wol, persetujuan ekspor daging Australia, perizinan impor, perizinan karantina impor, pengujian karantina biji-bijian dan pengakuan laporan laboratorium Australia terkait kepatuhan standar Australia. 2. Memperketat perbedaan pada perdagangan barang, RoO, prosedur kepabeanan, TBT, SPS. 3. Diskusi lebih lanjut terkait perdagangan jasa terutama dalam bidang transportasi. 4. Diskusi dalam bidang investasi terutama dalam bidang tambang.
Kesebelas	Beijing, 16-20 Juni 2008	<p>Terdapat beberapa topik yang dibahas dalam negosiasi putaran kesebelas, yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai dilakukannya pengerjaan bab RoO berdasarkan pada metode CTC 2. Diskusi dalam prosedur kepabeanan dimana Australia menuntut pendekatan yang diusulkan oleh mereka terkait dengan tindakan non-tarif. 3. Kedua negara mengajukan permintaan kebijakan non-tarif dalam bidang berbeda yakni Australia dalam bidang jasa dan Tiongkok dalam bidang investasi serta karantina. 4. Pembahasan kembali terkait dengan kekayaan intelektual.
Keduabelas	Canberra, 22-26 September 2008	<p>Masih sama seperti pada putaran-putaran sebelumnya, di dalam putaran kedua belas kembali beberapa membahas topik serupa secara mendalam, meliputi;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan barang 2. RoO dan kebijakan kepabeanan 3. SPS, TBT dan karantina 4. Pembahasan dalam bidang jasa dimana Australia berfokus dalam beberapa sektor jasa yakni finansial, pendidikan, hukum dan komunikasi. 5. Pembahasan dalam area investasi dan layanan pertambangan. 6. Dalam putaran ini, Tiongkok tertarik dengan isu perpindahan sementara dan pengobatan tradisional Tiongkok. 7. Pembahasan dalam bidang perdagangan elektronik serta pengadaan barang dan jasa.
Ketiga belas	Beijing, 1-5 Desember 2008	Pada putaran ketiga belas, pembahasan serupa dengan pembahasan dalam putaran kedua belas hanya terdapat satu topik tambahan yakni terkait dengan kelanjutan diskusi dimana Tiongkok mengutarakan kepentingannya di dalam bidang jasa terutama dalam sektor pendidikan, komunikasi, dan jasa transportasi udara.
Keempat belas	Canberra, 24-26 Februari 2010	Setelah satu tahun negosiasi tertunda, putaran negosiasi terkait FTA Tiongkok dan Australia kembali dilakukan, dalam tahap ini terdapat beberapa topik yang dibahas, yakni; <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan barang 2. RoO 3. Prosedur kebijakan Kepabeanan 4. Pembahasan terkait SPS, TBT dan karantina 5. Perdagangan jasa 6. Pengadaan barang dan jasa, perdagangan elektronik dan kekayaan intelektual
Kelima belas	Beijing, 28-30 Juli	Dalam putaran ini, terdapat topik terbaru yang

	2010	dibahas yakni terkait dengan detail akses pasar dalam sektor pertanian dan industri.
Keenam belas	Canberra, 5-7 juli 2011	Putaran keenam belas ini terdapat beberapa kemajuan signifikan dalam pembahasan FTA meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua negara terus mempersempit perbedaan dalam perdagangan barang, RoO, masalah SPS, hambatan teknis perdagangan dan prosedur kepabeanan 2. Kedua negara juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap teks yang membahas mengenai hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa serta melakukan klarifikasi.
Ketujuh belas	Beijing, 22-24 November 2011	Topik bahasan dalam putaran ketujuh belas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua negara terus melakukan pertukaran informasi mengenai status prioritas dan komoditas sensitif pada akses pasar barang serta mengenai jasa dan investasi. 2. Pembicaraan mendalam terkait dengan permintaan dan penawaran dari masing masing negara. 3. Pembahasan teks pada bab perdagangan barang, RoO, SPS, dan TBT. 4. Penyelesaian teks pada bab sengketa dan transparansi.
Kedelapan belas	Canberra, 19-21 Maret 2012	Pada putaran ke delapanbelas, pembahasan merupakan lanjutan dari putaran sebelumnya seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan pembahasan terkait sektor prioritas dan sensitif dalam pasar barang, bidang jasa dan investasi serta penyelesaian terkait sengketa. 2. Kemajuan pada penulisan teks bab perdagangan barang, prosedur

		kepabeanan, SPS, dan TBT.
Kesembilan belas	Beijing, 4-6 Juli 2013	<p>Pada tahap ini, keseluruhan bab pada teks perjanjian FTA antara kedua negara telah selesai dibahas dan terdapat beberapa topik pembahasan dalam putaran ke sembilan belas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan mengenai definisi dari ruang lingkung akses pasar. 2. Diskusi lanjutan terkait perdagangan barang, RoO, kepabeanan, investasi dan penyelesaian sengketa. 3. Peningkatan pembicaraan dalam SPS, TBT dan perdagangan jasa.
Kedua Puluh	Canberra, 5-8 Mei 2014	<p>Poin pembahasan pada putaran kedua puluh adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait detail akses pasar. 2. Mendiskusikan kembali bab perdagangan barang, TBT, kepabeanan, fasilitas perdagangan, RoO, penyelesaian sengketa, dan penanaman modal. 3. Membuat target sesuai pada kesimpulan perjanjian yang dicapai pada akhir tahun 2005.
Keduapuluh satu	Beijing, 1-5 September 2014.	<p>Putaran kedua puluh satu merupakan putaran terakhir sebelum dilakukannya finalisasi negosiasi. Pada putaran ini, diskusi yang dilakukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan pembahasan dalam bidang perdagangan barang, pemulihan perdagangan, RoO, prosedur kepabeanan dan fasilitas perdagangan, TBT, kekayaan intelektual serta penyelesaian sengketa. 2. Melakukan finalisasi pada bab perdagangan jasa.

Sumber: Faktor pendorong Australia menandatangani Bilateral Trade Agreement dengan China Dalam China Australia Free Trade Agreement tahun 2015 oleh Ridha Listyanirmala.

Pengimplementasian ChAFTA baru berlaku sejak tanggal 20 Desember 2015 dan dilaporkan kepada WTO.²¹

Menjelang dan selama negosiasi, pemerintah Australia menerima 260 pengajuan publik mengenai ChAFTA dan 710 konsultasi langsung yang dilakukan oleh para *stakeholder*.²² Pembentukan ChAFTA ini menimbulkan beberapa kontroversi dan pertentangan oleh domestik Australia seperti penolakan yang dilakukan oleh *Green Party* yang menganggap bahwa ChAFTA akan merugikan pekerja lokal dan memberikan dampak negatif bagi sektor manufaktur dalam negeri.²³ AWMU juga menyuarakan bahwa dengan adanya ChAFTA, industri manufaktur Australia akan mengalami defisit perdagangan serta kekhawatiran apabila tenaga kerja Australia akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang dari Tiongkok.²⁴ Selain itu, *Australia Industry Group* juga melakukan survey terhadap 160 pemilik bisnis manufaktur dimana hasil survey tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari total peserta survey merasa bahwa ChAFTA mampu memberikan dampak negatif bagi usaha yang mereka geluti.²⁵

²¹ Yu Sheng, "ECONOMIC GROWTH in CHINA and ITS POTENTIAL IMPACT on AUSTRALIA/CHINA BILATERAL TRADE: A PROJECTION for 2025 BASED on the CGE ANALYSIS" (East Asian Bureau of Economic Research, June 23, 2015), https://saber.eaber.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/07/EABER-Working-Paper-122-Sheng_0.pdf.

²² *Ibid.*

²³ The Greens Tasmania, "Greens Members Unanimously Reject Dangerous and Undemocratic TPP and ChAFTA Deals," Tasmanian Greens, November 8, 2015, accessed October 29, 2021, <https://greens.org.au/tas/news/media-release/greens-members-unanimously-reject-dangerous-and-undemocratic-tpp-and-chafta>.

²⁴ Australian Manufacturing Workers Union, "Submission to the Senare Foreign Affairs, Defence and Trade References Committee Concerning Australia's Relationship with China," 2005.

²⁵ Jasmina, "China Free-Trade Agreement Could Hurt Australian Manufacturers, Survey Show," Australian Manufacturing, October 27, 2014, accessed October 31, 2021, <https://www.australianmanufacturing.com.au/23389/china-free-trade-agreement-hurt-australian-manufacturers-survey-show>.

Sementara itu bagi Tiongkok, Australia kurang memiliki peran penting sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan oleh negara. Berdasarkan data tahun 2014, total ekspor Tiongkok ke Australia kurang lebih sebesar US\$ 37.5 miliar sementara total impor Australia untuk Tiongkok mencapai pada angka US\$ 98.9 miliar.²⁶ FTA antara Tiongkok dan Australia, sebagian besar hanya memberikan keuntungan ekonomi terhadap Australia mengingat Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar bagi Australia. ChAFTA memberikan akses pasar utama bagi lebih dari 85% barang Australia yang diekspor ke Tiongkok (berdasarkan pada data tahun 2013) untuk memasuki pasar bebas tarif pada saat implementasi ChAFTA terjadi dan akan meningkat hingga 93% setelah empat tahun perjanjian berjalan dan pada akhirnya akan terus meningkat hingga 95% ketika ChAFTA telah diterapkan secara sepenuhnya.²⁷ Dengan dibukanya pasar Australia, justru mampu memberikan ancaman terhadap produk dalam negeri Tiongkok dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Tiongkok. Namun, negosiasi bahkan finalisasi perjanjian ChAFTA tetap berjalan dan disepakati oleh Tiongkok.

Meskipun mendapatkan dorongan negatif dari lingkungan domestik Australia serta kondisi dari Tiongkok, negosiasi perjanjian ChAFTA yang telah berjalan selama kurang lebih 1 dekade tetapi dilaksanakan bahkan dipercepat. Melalui proses yang cukup panjang tersebut, pada akhirnya perjanjian dagang

²⁶ National Bureau of Statistic of China, "China Statistical Yearbook-2014," www.stats.gov.cn, 2014, accessed November 1, 2021, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm>.

²⁷ Trade and Investment Queensland Australia, "China-Australia Free Trade Agreement," n.d., accessed November 1, 2021, <https://www.tiq.qld.gov.au/download/business-interest/export/free-trade-agreements/China-Australia-Free-Trade-Agreement.pdf>.

antara Tiongkok dan Australia berhasil untuk disepakati dan diimplementasikan sebagai imbas dari upaya kedua negara dalam menyusun strategi dan kerjasama antar kedua negara.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan terhadap dua aktor utama yakni Tiongkok dan Australia sebagai dua negara yang terlibat di dalam perjanjian ChAFTA. Dalam penelitian ini, penulis akan mendalami faktor-faktor yang mendorong pembentukan ChAFTA yang pada akhirnya difinalisasi pada tahun 2015. Pembatasan waktu yang dipilih oleh penulis adalah sejak tahun 2003 ketika Tiongkok dan Australia baru memulai negosiasinya terkait dengan pembentukan FTA diantara kedua negara hingga tahun 2015 dimana ChAFTA pada akhirnya disetujui dan diimplementasikan oleh kedua negara. Fokus pada penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terwujudnya perjanjian perdagangan bebas antara Australia dan Tiongkok sebagaimana fokus tersebut didasarkan negosiasi yang memerlukan waktu cukup panjang serta berbagai tantangan yang dilewati oleh kedua negara untuk melakukan finalisasi perjanjian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional kategori *Middle-Range Objective* K.J Holsti , Teorema H-O oleh Eli Hicksher dan Bertil Ohlin, serta konsep *Bilateral Trade Agreement* yang dikemukakan oleh Jayant Menon.

1.2.3 Rumusan Masalah

Melalui identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dibentuk sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Apa faktor yang melatarbelakangi Tiongkok dan Australia menyetujui negosiasi *China-Australia Free Trade Agreement* pada tahun 2015?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendorong terwujudnya perjanjian ChAFTA antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015 secara komprehensif.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibentuk sebagai sebuah kontribusi terhadap bidang akademik studi Ilmu Hubungan Internasional untuk memberikan informasi dan referensi yang sesuai dengan topik atau isu yang dibahas. Penelitian ini dilakukan sehingga dapat menjadi referensi serta acuan akademik bagi pembaca. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk membantu sesama akademisi dalam memperkaya wawasan serta memberikan informasi yang relevan terkait dengan ekonomi politik internasional khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

1.4 Kajian Literatur

Pada penelitian ini, diperlukannya kajian literatur dengan menggunakan studi terdahulu guna menunjukkan penelitian yang telah membahas objek penelitian serupa yakni mengenai proses negosiasi hingga terealisasinya perjanjian ChAFTA di tahun 2015. Kajian literatur ini digunakan oleh penulis sebagai sebuah landasan yang mampu membantu penulis untuk memberikan pemahaman secara mendalam terkait dengan dinamika dan pembentukan ChAFTA oleh Tiongkok dan Australia.

Mark Beeson dan Jinghan Zeng dalam artikel jurnal yang berjudul “*Realistic Relations? How the Evolving Bilateral Relationship is Understood in China and Australia*”²⁸, yang diterbitkan oleh *Inha Journal of International Studies* pada tahun 2017 menjelaskan mengenai cara strategis dalam melakukan kerjasama ekonomi dan politik dalam hubungan Australia dan Tiongkok.

Dalam menjelaskan hubungan kerjasama Tiongkok dan Australia, Beeson dan Zeng menggunakan teori realisme. Aplikasi dari teori tersebut terlihat melalui bagaimana jurnal ini menjelaskan hubungan kerjasama Tiongkok dan Australia yang dirasa penting bagi kedua negara. Perkembangan ekonomi Tiongkok yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir, membuat negara seperti Australia dapat dengan cepat terintegrasi untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok dimana hal tersebut menimbulkan tantangan bagi Australia sebagai negara yang

²⁸ Mark Beeson and Jinghan Zeng, “Realistic Relations? How the Evolving Bilateral Relationship Is Understood in China and Australia,” *Pacific Focus* 32, no. 2 (August 2017): 159–81, <https://doi.org/10.1111/pafo.12094>.

berusaha untuk menyeimbangkan antara prioritas strategi atau ekonomi.²⁹ Dalam jurnal ini, Australia memberikan ilustrasi mengenai bagaimana elit Tiongkok memandang Australia sebagai wilayah kunci yang memiliki prioritas strategi dan ekonomi yang cukup kuat.³⁰

Literatur ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagaimana penelitian akan membahas hubungan bilateral antara Tiongkok dan Australia, akan tetapi penelitian ini akan berfokus pada faktor pendorong baik eksternal maupun internal yang didapatkan oleh Tiongkok dan Australia dalam mewujudkan perjanjian CAFTA. Literatur ini memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis sebagaimana jurnal ini memberikan gambaran umum terhadap cara pemikiran pengambil keputusan atau kaum elit Australia dan Tiongkok dalam melakukan hubungan kerjasama.

Menurut **Peter Egger dan Mario Larch** dalam jurnalnya yang berjudul “*An assessment of the Europe agreements’ effects on bilateral trade, GDP, and welfare*”³¹, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh *European Economic Review*, jurnal ini menjelaskan mengenai perjanjian Eropa yang telah berlaku pada tahun 1990-an untuk memulai sebuah integrasi pasar barang diantara 15 negara Uni Eropa pada tahun 1995 dan 10 negara potensial yang berlokasi di Eropa Timur dan tengah, jurnal ini juga mengevaluasi perdagangan, GDP dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari perjanjian.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Peter Egger and Mario Larch, “An Assessment of the Europe Agreements’ Effects on Bilateral Trade, GDP, and Welfare,” *European Economic Review* 55, no. 2 (February 2011): 263–79, <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2010.05.002>.

Dalam analisisnya, Egger dan Larch menggunakan model arus perdagangan bilateral untuk melihat bagaimana perjanjian Eropa mampu membawa keuntungan bagi perdagangan, GDP dan meningkatkan kesejahteraan dari negara yang terlibat di dalamnya. Dengan menerapkan model arus perdagangan bilateral, penelitian ini menyuguhkan 3 hasil utama yakni (1) perjanjian yang dibentuk memberikan efek positif pada arus perdagangan antara EU15 dan CEEC, disaat yang bersamaan perjanjian ini juga mendorong pengalihan perdagangan dari negara lain, (2) GDP UE15 mengalami peningkatan lebih kecil dari 1%, sementara itu 10 CEEC mengalami peningkatan beberapa persen melalui kesepakatan yang telah dibuat (3) peningkatan kesejahteraan bagi negara EU 15 hanya berada pada tingkatan sedang, sementara bagi negara CEEC tingkat kesejahteraan mengalami perubahan hingga dua digit persen.³²

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dengan jurnal dari Egger dan Larch yakni melihat bagaimana melalui perdagangan bilateral, negara mampu memperoleh keuntungan dari perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai alasan dilakukannya kerjasama. Namun, literatur tersebut hanya berfokus kepada arus perdagangan, GDP dan tingkat kesejahteraan, sementara dalam penelitian kali ini peneliti juga berusaha untuk mengkaji alasan dilakukannya kerjasama bukan sebatas ekonomi tetapi juga pada tingkat politik. Selain itu peneliti juga akan menggunakan konsep yang sama dengan literatur yakni model arus perdagangan bilateral.

Jurnal terakhir dalam kajian literatur ini ditulis oleh **Megan Bowman, George Gilligan dan Justin O'Brien** yang berjudul "*The China-Australia Free*

³² *Ibid.*

*Trade Agreement and the Growing Acceptance of Chinese State Capital Investment*³³, yang terbit pada tahun 15 oleh *Asian Journal Of Public Affairs*. Jurnal ini membahas mengenai peningkatan pengaruh pasar modal negara sebagai suatu sumber likuiditas di pasar modal global dan investasi langsung. Jurnal ini menggunakan contoh kasus AFTA untuk menunjukkan bagaimana meningkatnya pengaruh pasar modal negara mampu mempengaruhi persepsi dari negara tujuan investasi.

Jurnal ini menjelaskan bahwa dengan penandatanganan AFTA menjadi pelengkap dari FTA yang telah dilakukan Australia dengan negara di Asia Pasifik sebelumnya yakni Jepang dan Korea. Secara spesifik jurnal ini juga menjelaskan mengenai strategi nasional Tiongkok dalam melakukan investasi di Australia sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan perdagangan dengan negara yang berdekatan di wilayah Asia Pasifik. Tiongkok merupakan negara yang menggunakan BUMN sebagai sumber investasi di pasar modal asing, dimana tren ini mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir yakni negara menjadi aktor penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi.³⁴ Terlebih dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat sehingga memberikan pengaruh terhadap strategi penanaman modal, salah satunya dengan Australia. Investasi BUMN Tiongkok menjadi sangat penting bagi Australia terutama dalam bidang pertambangan dan energi dimana BUMN Tiongkok turut serta hingga 76% dari total transaksi. Melalui hal tersebut, ChAFTA dianggap menjadi sebuah

³³ Megan Bowman, George Gilligan, and Justin O'Brien, "The Australia-China Free Trade Agreement and the Growing Acceptance of Chinese State Capital Investment," *Asian Journal of Public Affairs* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.18003/ajpa.201501>.

³⁴ *Ibid.*

langkah penting bagi Australia untuk menjaga masuknya arus modal dari Tiongkok sehingga Australia mampu menerima modal BUMN Tiongkok dari waktu ke waktu.³⁵

Melalui literatur ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai kondisi kerjasama Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok dan Australia melalui perjanjian ChAFTA. Tentunya kesamaan yang dimiliki oleh literatur dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan topik yang membahas mengenai ChAFTA, namun perbedaannya adalah bagaimana jurnal ini menjelaskan mengenai Australia memandang Tiongkok sebagai mitra dalam bidang investasi dan bagaimana ChAFTA yang menjadi sebuah perjanjian yang mampu mengatur arus investasi dari BUMN Tiongkok.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut para ahli, definisi Hubungan Internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni definisi secara sempit dan definisi secara luas. Secara sempit, Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai hubungan antar negara (*inter-state relation*) atau hubungan antar bangsa (*relation between nation*).³⁶ Dalam arti sempit, Hubungan internasional juga dapat dikatakan sebagai aksi dan reaksi antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh *elite* atau perwakilan dari negara tersebut.³⁷ Definisi hubungan internasional secara sempit

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, 1st ed. (Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri, 2017), 2.

³⁷ *Ibid.*

lebih menekankan terhadap politik internasional dan berorientasi pada negara atau *state-centric*.

Seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dunia mulai dari teknologi hingga komunikasi serta kemunculan aktor non-negara yang ikut terlibat dalam hubungan internasional sehingga mendorong adanya transformasi terhadap definisi hubungan internasional. Dalam arti luas, Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antar negara, termasuk aktivitas serta kebijakan pemerintah nasional, IO, NGO, DAN MNC.³⁸ Dalam artian yang luas, hubungan internasional tidak hanya berfokus terhadap siapa saja aktor yang terlibat di dalam hubungan internasional tetapi juga isu-isu yang terlibat di dalamnya. Globalisasi menyebabkan batas-batas antar negara menjadi semakin samar sehingga hubungan internasional tidak dapat hanya dikatakan sebagai sebuah politik internasional.³⁹

Melalui kedua definisi tersebut, dapat ditegaskan mengenai tiga hal utama yakni, yang pertama, hubungan internasional mencakup semua bentuk interaksi yang melintasi batas negara baik dalam isu tradisional maupun non-tradisional. Yang kedua, Aktor yang terlibat di dalam hubungan internasional bukan hanya negara namun juga terdapat aktor non-negara yang mampu terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah studi Hubungan Internasional bukan hanya membahas mengenai ilmu politik, melainkan bagian dari ilmu sosial yang bersifat interdisipliner.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, 5.

³⁹ *Ibid.*,5.

⁴⁰ *Bakry, Op.Cit.*, 7-8.

Dalam bidang studi Hubungan Internasional, tentunya terdapat paradigma dan teori yang digunakan untuk menjelaskan fakta atas suatu kejadian. Dalam teori Hubungan Internasional terdapat dua teori dominan meliputi realisme dan liberalisme. Pada penelitian kali ini, penulis akan menggunakan salah satu teori dominan yakni liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah landasan filosofi pemikiran politik modern yang terlahir dari abad pencerahan Eropa dimana teori ini menyerukan peran minimal pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, jaminan kebebasan individu dalam berpolitik, demokrasi dan konstitusionalisme, dan kesetaraan hukum.⁴¹ Liberalisme juga mempercayai bahwa melalui sistem perekonomian kapitalis mampu menjamin kemakmuran bersama dan mampu mengalokasikan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat secara efisien.⁴²

Pemikiran liberalisme klasik masuk ke dalam studi Hubungan Internasional melalui beberapa gelombang. Liberalisme ekonomi mulai masuk ke dalam kajian Hubungan Internasional pada gelombang kedua liberalisme klasik di tahun 1970-an dan 1980-an ketika para pakar Hubungan Internasional memperhatikan berapa pentingnya peran aktor-aktor non-negara terutama perusahaan transnasional dalam mempercepat proses globalisasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi.⁴³ Menurut kaum liberalis perdagangan bebas merupakan cara untuk mencapai kedamaian, hal ini dikarenakan

⁴¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 79.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

ketidakmampuan negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri menyebabkan negara harus melakukan hubungan kerjasama.⁴⁴

Kerjasama merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh negara guna memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kerjasama ini mampu dilakukan oleh negara dalam berbagai bentuk mulai dari kerjasama bilateral, multilateral, regional atau bahkan kerjasama internasional. Kerjasama dilakukan oleh suatu negara dilakukan dengan tujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan warga negaranya, (2) mencegah kemungkinan terjadinya suatu konflik, (3) mempererat hubungan antar negara dan, (4) mencapai kepentingan nasional.

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Sebuah negara memiliki kepentingan yang didasari oleh situasi domestik suatu negara baik situasi politik, militer, ekonomi maupun budaya.⁴⁵ Kepentingan nasional menjadi suatu hal yang penting untuk dicapai dalam melakukan kerjasama internasional. K.J Holsti mendeskripsikan kepentingan nasional sebagai kumpulan ide atau tujuan dari sebuah negara guna merubah keadaan negara tersebut.⁴⁶ Holsti mengatakan guna mencapai kepentingan nasional, suatu negara akan menuangkannya dalam bentuk kebijakan luar negeri negara tersebut.⁴⁷ Maka dari itu, kepentingan nasional menjadi sebuah tonggak yang mampu menentukan bagaimana suatu negara mampu bertindak dan beraktivitas baik di dalam maupun luar negeri. Setiap negara memiliki jangka waktu kebijakan luar negeri yang

⁴⁴ Hadiwinata, *Op.Cit.*, 89.

⁴⁵ Robert H Jackson, Georg Sørensen, and Jørgen Møller, *Introduction to International Relations : Theories and Approaches* (Oxford ; New York, Ny: Oxford University Press, 2013), 95.

⁴⁶ K.J Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (Bandung: Bina Cipta, 1987), 92.

⁴⁷ *Ibid.*

berbeda-beda, K.J Holsti mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi tiga kategori berdasarkan jangka waktunya yakni.⁴⁸

1. *Core Interest*

Core Interest ini merupakan kepentingan dasar yang bersifat keberlanjutan. Dalam *Core Interest*, terdapat satu variabel inti yang disebutkan oleh K.J Holsti yakni *Self-Preservation*. *Self-Preservation* merupakan bagian utama dalam *Core Interest* yang digunakan untuk mempertahankan sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu negara melalui kebijakan luar negeri.⁴⁹

2. *Middle Range Objective*

Kepentingan ini memiliki tiga variabel dasar, Variabel pertama adalah usaha pemerintah untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui tindakan yang bersifat sosial maupun ekonomi.⁵⁰ Variabel kedua adalah suatu negara berupaya untuk meningkatkan eksistensi negaranya melalui kerjasama yang dijalin.⁵¹ Variabel ketiga adalah negara melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas pengaruh yang dimilikinya, pengaruh disini memiliki definisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.⁵²

3. *Long Range Objective*

⁴⁸ *Ibid.*, 43.

⁴⁹ *Holsti, Op.Cit.*, 185.

⁵⁰ *Ibid*, 188.

⁵¹ *Ibid* 188.

⁵² *Ibid*, 191.

Kepentingan ini memiliki tujuan jangka panjang. Variabel dasar yang dimiliki *Long Range Objective* menyangkut cita cita negara di dalam mata internasional yakni *Vision, Mission* dan *The Dream of State*.⁵³

Untuk mencapai kepentingan nasional yang tercermin dalam kebijakan luar negeri suatu negara maka dibutuhkan kerjasama. Hal ini didorong oleh ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri dengan sumber daya yang terbatas di setiap negara.

Trade liberalization atau liberalisasi perdagangan merupakan penghapusan hambatan baik hambatan tarif maupun non-tarif dalam sistem perdagangan Internasional.⁵⁴Namun, dasar dari liberalisasi perdagangan adalah prinsip keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh Eli Hicksher dan Bertil Ohlin yang dikenal sebagai teorema Hicksher-Ohlin atau teorema H-O.⁵⁵ Teorema ini menyatakan bahwa setiap negara yang terlibat dalam perdagangan akan mengekspor sumber daya yang melimpah dalam negara tersebut. Berikut merupakan deskripsi singkat mengenai negara yang terlibat dalam perdagangan internasional:

Terdapat dua negara yakni negara A dan negara B yang terlibat dalam perdagangan internasional. Negara A memproduksi kain (C) dan negara B memproduksi baja (S), jumlah produk ini akan disebut sebagai Qc dan QS, dan harga akan disebut sebagai Pc dan Ps. Total upah tenaga kerja disebut sebagai W

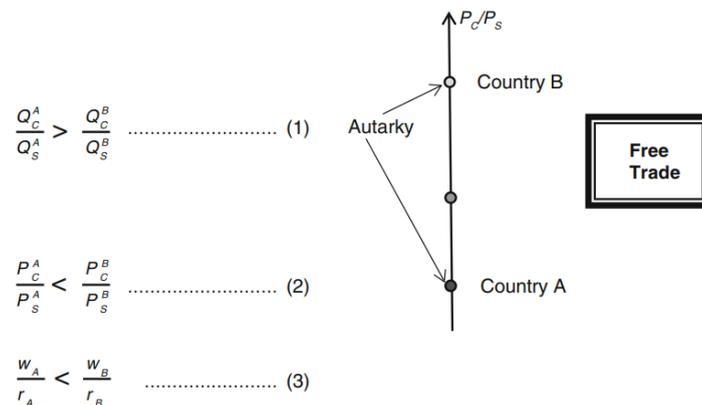
⁵³ *Ibid*, 199.

⁵⁴Sanjaya Acharya, "Trade Liberalization," *Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics*, 2015, 393–412, https://doi.org/10.1007/978-1-137-37138-6_21.

⁵⁵ *Ibid*.

dan total biaya sewa disebut R. Sedangkan upah dan pengembalian modal disebut sebagai w dan r.⁵⁶

Grafik 1. Alasan Negara Memulai Perdagangan Internasional



Sumber: *Trade Liberalization* oleh Sanjaya Acharya

Dalam situasi minimnya perdagangan seperti ilustrasi pada grafik 1, kedua negara terus memproduksi baja dan kain masing-masing. Karena tenaga kerja relatif lebih banyak di negara A dan negara kapital di negara B, maka kain akan tetap mahal di negara B dan baja akan tetap mahal di negara A. Namun, Apabila perdagangan diliberalisasikan di antara kedua negara, A mengekspor kain ke B dan B mengekspor baja ke A maka harga baja dan kain bisa menjadi lebih murah di antara kedua negara. Proses ini akan terus berlanjut hingga harga produk pada kedua negara dapat disamakan. Dalam ekuilibrium yang baru ini ketidaksetaraan dalam persamaan (1) tetap menjadi negara yang terus memproduksi barang-barangnya menggunakan sumber daya masing-masing, (2) munculnya ketidaksetaraan dalam persamaan dan (3) menghilang dalam equilibrium yang baru setelah perdagangan.⁵⁷ Berdasarkan teorema H-O, maka

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

negara memutuskan untuk melakukan liberalisasi pasar yang mampu meningkatkan keuntungan negara.

Dalam jurnalnya yang berjudul “*Bilateral Trade Agreement*”, Jayant Menon menjelaskan mengenai salah satu faktor pendukung negara melakukan kerjasama disebabkan oleh *Politically Motivated* dan *Economically Motivated Driven*.

Jayant Menon menjelaskan bahwa setiap hubungan atau kerjasama yang terjalin antar negara tidak akan bisa terlepas dari motif politik, termasuk di dalamnya adalah hubungan perdagangan. Salah satu faktor yang ikut menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan dari negosiasi ChAFTA adalah faktor politik meliputi peran dari aktor politik atau partai politik yang memiliki peran besar, selain itu juga isu ekonomi politik ikut menjadi faktor yang mempengaruhi.⁵⁸

Di dalam kategori *Economically Motivated Driven* terdapat dua sub kategori yakni *sector driven* dan *market access*. *Sector driven* BTA akan dibagi lagi menjadi dua yakni *sector expanding* dan *sector excluding*. Sementara untuk *market access* BTA akan dibagi menjadi dua kelompok yakni *market restoring* dan *market creating*.⁵⁹

❖ *Sector driven*

Pada kategori ini, motivasi pembentukan BTA disebabkan oleh keinginan negara untuk melakukan liberalisasi hingga sektor yang sebelumnya

⁵⁸Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreements,” *Asian-Pacific Economic Literature* 21, no. 2 (November 2007): 29–47, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2007.00201.x>, 33.

⁵⁹Jayant Menon, “Bilateral Trade Agreements,” *Asian-Pacific Economic Literature* 21, no. 2 (November 2007): 29–47, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.2007.00201.x>, 33.

diabaikan dalam *multilateral level* atau ingin memfokuskan pada beberapa sektor utama. Dalam *sector driven* terdapat dua sub kategori yakni *sector expanding* dan *sector excluding*.⁶⁰

- *Sector expanding*

BTA muncul disebabkan oleh keinginan negara untuk melakukan liberalisasi dengan cara yang jauh lebih mudah dan singkat. Dengan hanya melibatkan dua pihak dalam kerjasama maka akan semakin mudah bagi kedua pihak yang terlibat untuk melakukan negosiasi dan meminimalisir terjadinya ketidaksepakatan. Maka dari itu, BTA memiliki kesempatan untuk mencapai pada level integrasi yang lebih tinggi dibandingkan kerjasama multilateral yang melibatkan banyak aktor di dalamnya.⁶¹

- *Sector excluding*

BTA akan memberikan pengecualian kepada sektor yang dianggap sensitif. Sebagian besar BTA tidak akan memasukan sektor pertanian di dalamnya karena dianggap sebagai sektor yang cukup sensitif dalam hal liberalisasi. Hal ini membuat negara memiliki pilihan untuk memilih sektor mana yang mampu untuk di liberalisasi dan mana yang merupakan sektor sensitif.⁶²

❖ *Market Access*

Pada kategori ini, motivasi dibentuknya BTA adalah untuk menciptakan akses pasar atau perdagangan lebih besar dari yang telah ada

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Menon, Op.Cit., 34*

sebelumnya.⁶³ Dalam *market access* terdapat dua sub-kategori yakni *market restoring* dan *market creating*.

- *Market restoring*

BTA terwujud didorong oleh motivasi negara untuk mengamankan pasar regional mereka dari sistem perdagangan internasional. Motivasi ini timbul akibat kekhawatiran negara apabila tidak bergabung dalam PETA maka akan menyebabkan negara kehilangan pasar yang sebelumnya telah dimiliki. BTA menjadi upaya bagi negara untuk mengurangi diskriminasi sebagai dampak dari PTA yang telah hadir sebelumnya.⁶⁴

- *Market Creating*

BTA hadir sebagai pencipta pasar yang hadir untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dahulu lemah akibat dari hambatan perdagangan. Melalui BTA, dua negara yang sebelumnya memiliki hambatan perdagangan yang relatif tinggi, tetapi kemudian saling menghapuskan hambatan-hambatan yang ada secara istimewa guna menciptakan peluang perdagangan.⁶⁵

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, 34- 35

⁶⁵ *Ibid*, 35

Metode penelitian sangat penting sebagai sarana dalam melakukan penelitian. Metode ini akan membantu peneliti dalam memberikan data data yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor Pendukung Terwujudnya Perjanjian CAFTA antara Tiongkok dan Australia pada tahun 2015**”. Metode penelitian akan menjadi alat dalam melakukan analisis data sehingga dapat membantu untuk menemukan kesimpulan di dalam penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pendekatannya digunakan untuk merekonstruksi atau membangun sesuatu realita sosial yang baru. Di dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti akan berusaha untuk mengolah serta menguasai fenomena yang terjadi secara mendalam. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif.

Data penelitian akan bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut diperoleh melalui media massa, hasil observasi serta kajian literatur. Menurut Miles dan Huber, setelah mendapatkan data maka kegiatan penelitian akan dilakukan dengan 3 alur yakni yang pertama, reduksi data yaitu dengan menganalisis, menajamkan, mengorganisasikan, mengkategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan dengan sedemikian rupa sehingga data dapat diverifikasi. Yang Kedua, penyajian data merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi dimana merupakan kegiatan akhir dalam penelitian.⁶⁶

⁶⁶ Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 83-85.

Dua alasan penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yakni, yang pertama penelitian mengenai hubungan antar negara memerlukan data yang bersifat aktual dan kontekstual, kedua penulis menggunakan metode penelitian ini karena sifat dari masalah yang akan diteliti. Pertimbangan lain dalam menggunakan metode ini dikarenakan data yang diperoleh merupakan data yang bersifat deskriptif bukan matematis, sehingga hasil penelitian dapat mengungkap fenomena yang mendorong Tiongkok dan Australia untuk menandatangani perjanjian ChAFTA. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena realitas sosial yang menjadi objek dari penelitian. Melalui penelitian ini, penulis berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis dalam penelitian hingga pencetus penelitian.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian adalah dengan menggunakan metode studi pustaka. Metode tersebut merujuk pada data berupa dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber informasi dari penelitian yang akan dilakukan.⁶⁷ Dokumen yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian dapat berupa dokumen publik seperti koran, hasil rapat dan laporan resmi, selain itu dokumen juga dapat berupa dokumen pribadi seperti jurnal pribadi, surat dan email.⁶⁸

⁶⁷ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), 171.

⁶⁸ John W Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc, 2018).

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian. Data akan diperoleh dari media massa (berita, pidato, dan wawancara), literatur berupa jurnal dan buku terkait dengan topik penelitian. Peneliti juga akan menggunakan beberapa dokumen publik yang diperoleh dari situs resmi pemerintahan Tiongkok dan Australia. Selain itu, ada pula data statistik ekspor dan impor dari negara Australia dan Tiongkok yang diperoleh dari laman resmi pemerintah dan badan statistik.

1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan terdiri atas 4 bagian.

Bab 1 merupakan bagian yang akan membahas mengenai rancangan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika penelitian.

Bab 2 akan membahas mengenai hubungan Tiongkok dan Australia sebelum kedua negara melakukan negosiasi ChAFTA. Pembahasan akan dimulai dengan sejarah hubungan kedua negara, kemudian dilanjutkan dengan hubungan ekonomi kedua negara sebelum ChAFTA serta potensi yang dimiliki oleh Australia maupun Tiongkok dalam melakukan kerjasama ChAFTA.

Bab 3 merupakan bagian inti dari penelitian dimana pada bagian ini akan menjadi bagian analisis deskriptif terkait dengan faktor yang menyebabkan terwujudnya perjanjian AFTA pada tahun 2015. Analisis akan dilakukan dengan

menggunakan dengan menggunakan sudut pandang konsep kepentingan nasional oleh K.J Holsti, teorema H-O oleh Eli Hicksher dan Bertil Ohlin serta *Bilateral Trade Agreement* oleh Jayant Menon untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana kedua negara akhirnya sepakat untuk menandatangani perjanjian perdagangan.

Bab 4 merupakan bagian akhir dalam penelitian yang memberikan elaborasi terkait kesimpulan dari hasil analisis faktor yang menyebabkan terwujudnya perjanjian ChAFTA. Bagian ini akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan dengan hasil penelitian dan argumentasi dari bab sebelumnya.